

KONSTRUKSI. PERAN POLITIK PEREMPUAN
(Kajian Struktur Partisipasi Politik Perempuan Manggarai Dalam
Pendekatan Etnometodologi)

Oleh :
Oleh : Dr. Kridawati Sadiana, MS
Dosen FISIP Unmer Malang

Abstract

An axiom about the discrimination toward women as an inferior gender and men as a supreme gender is strongly influence to the life of communities in Manggarai. As a result, there has been inequity of the chances to the development between men and women, as well as to enhance women's role in the society. However, in general, among women themselves, there is a paradigm that politic is not their "business", since it seems to be "dirty" and "rough". This view causes less women are keen to involve in a political carrier, but, at the same time, it affirms the domination of men in the political arena.

The difference of gender's role in Indonesia is social issue that put women as the primary victim. This happens not only because of individual problems but also as a result of A 'social construction process'. In many ways, the difference of gender's role is conditioned by Indonesian society governance which is patriarchies. Manggarai society is non-matrilineal (patrilineal). Gender differentiation between men and women is applied since the baby is born. In common, a father or a person who is trusted by the family will knock the door of the room where the baby was borne by asking "Ata pe'ang ko ata one?" which literally means: "Outsider or insider." Manggarai society believes that a girl is outsider and boy is insider. The impact of the sexual status (a boy or a girl) has happened since the baby was born; and it will be carried on toward his/her right and opportunities until his/her entirely life. A boy (a man) will be provided by more rights and chances in developing himself through education, politic in social life; while, a girl (a woman) is much less leaders are women. It is obvious that men are dominant in term of leadership and politic.

And the problem formulation by the research are : How the construct of Manggarai women political role can be in order to develop the participation of women in political parties?; And the objectives of this research are: To explicate and analyze women political role in Manggarai ; to find out and analyze the constraints women political role in Manggarai to construct women political role in Manggarai

Keyword. Gender: discriminative and inequality ,social constellation, the contruc of social politic, accessibility,Manggarai Women, legislative, political participation of woman, political parties

PENDAHULUAN

Perbedaan peran gender yang ada di Indonesia merupakan masalah ketidakadilan sosial yang menempatkan perempuan sebagai korban utamanya. Hal ini terjadi bukan

hanya karena masalah antar individu, melainkan merupakan akibat sebuah 'proses konstruksi sosial'. Dengan berbagai cara, perbedaan peran gender dikondisikan oleh tatanan masyarakat Indonesia yang patriarkhis. Karena itu, proses perubahan harus mendorong masyarakat membiasakan diri melepaskan budaya dominasi dan diskriminasi diganti dengan budaya kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut terwujud dalam kehidupan faktual melalui tugas, peranan dan partisipasi setiap individu. Keberadaan perempuan dan laki-laki dimaknai sebagai suatu bentuk relasi unik yang komplementer dan resiprositas. Karena itu dunia bukanlah milik kaum lelaki semata-mata, dan juga bukan hanya milik kaum perempuan. Dunia milik bersama perempuan dan laki-laki

Kajian tentang struktur partisipasi politik perempuan merupakan bagian dari peran publik perempuan, termasuk perempuan Manggarai. Prospek perempuan Manggarai dalam bidang politik memang ada dan diakui, tetapi dominasi laki — laki masih kuat. Hal ini berkaitan dengan struktur sosial orang Manggarai yang menganut sistem patrilineal, tergambar dalam sistem "Wa'u" (garis keturunan Bapak). Sistem *Wa'u* mengarah pada pembedaan peran dan status laki laki dan perempuan. Laki — laki disebut *ata one* (*insider*) dan perempuan dipandang sebagai *ata pe'ang* (*the outsider*). Term *atape'ang* untuk perempuan menunjukkan bahwa status keberadaannya dalam keluarga hanya sementara. Karena itu, perempuan merupakan warga kelas dua/subordinat, dan laki — laki sebagai warga kelas utama (sebagai penerus suku). Konsekuensinya, prioritas perhatian dalam pengembangan diri maupun pemberian peluang dan kesempatan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan dan politik ditujukan kepada laki-laki.

Perumusan Masalah :

Mencermati berbagai kenyataan diatas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana konstruksi peran politik perempuan Manggarai untuk berpartisipasi dalam partai politik ?

HAMPIRAN TEORETIK

1. Perspektif Teori-teori Sosial

Perubahan sosial dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam sosiologi, sehingga lahir berbagai teori tentang perubahan sosial. Dari segi Sosiologi, perubahan-perubahan sosial yang menonjol dikelompokkan kedalam dua hal, yakni perubahan struktur sosial dan budaya, dan proses adaptasi individu terhadap perubahan sosial itu sendiri (lihat Tilaar, 2003:3-19). Sejalan dengan hal tersebut, perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat dilihat dari tiga dimensi perubahan(Himes dan Moore dalam Soelaiman, 1998:69), yaitu dimensi perubahan struktural, kultural dan interaksional. *Dimensi struktural* dari perubahan sosial mengacu kepada perubahan dalam bentuk

struktural masyarakat, perubahan peran, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial dan lembaga sosial; *dimensi kultural* mengacu kepada perubahan kebudayaan dalam masyarakat, seperti penemuan (*discovery*) dalam berfikir (ilmu pengetahuan), pembaharuan hasil (*invention*) teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan meminjaman kebudayaan; dan *dimensi interaksional* mengacu kepada perubahan hubungan sosial dalam masyarakat, berkenaan dengan perubahan dalam frekuensi, jarak sosial, perantaraan (saluran), aturan-aturan atau pola-pola, dalam bentuk hubungan.

Kemudian Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya timbulnya pengorganisasian perempuan dan gerakan emansipasi yang menyebabkan perubahan pada hubungan dan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dan menurut Spot (dalam Faisal dan Yazik, tt:89), penyebab perubahan sosial ada yang datang dari luar (*exogenous change*) dan perubahan dari dalam (*endogenous change*). Sedangkan menurut tingkat kemungkinan diramalkannya terdapat perubahan episodik (*episodic change*) dan perubahan terpola (*pattern change*). Harus disadari juga bahwa sebab-sebab perubahan sosial tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling berpautan dan semua perubahan sosial ini ke arah "tujuan" (teleologis), yaitu untuk kelestarian hidup masyarakat itu sendiri (Ginsberg).

Dalam masyarakat modern, perubahan sosial terjadi dengan cepat. Faisal & Yazik (tt: 88) mengatakan kecepatan perubahan sosial mungkin dipengaruhi oleh kontak kebudayaan yang drastis dan sekonyong-konyong, gerakan emansipasi dan munculnya pemerintahan sendiri, serta pesatnya penemuan-penemuan baru dibidang Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penelitian ini mengkaji masalah konstruksi peran politik perempuan Manggarai Flores NTT dengan pisau analisis teori sosial khususnya mengenai perubahan sosial. Dalam ilmu sosial terdapat tiga teori yang terkait dengan perubahan sosial, yaitu teori fungsionalis struktural, teori konflik dan teori interaksionisme simbolik (Harper, 1989:76-97). Menurut Aileen M Stewart, seorang ahli dalam pemberdayaan perempuan dan masyarakat berpendapat bahwa dalam *Womman Programm Development* yang dilakukan untuk mencapai perubahan peran politik perempuan minimal ada 3 kondisi yang diperlukan, yaitu (a) pemberian keahlian dan pembekalan keterampilan atau kompetensi tertentu (*expert power*), (b) pemberian peran dan peluang (*role power*), dan (c) pemberian fasilitas dan kemudahan untuk mewujudkan kemampuan (*resource power*) tersebut. Dalam istilah lain, itulah yang disebut program khusus sementara (*affirmative action*).

2. Konsep Partisipasi Politik

Politik (*politics*) adalah ber-meatn- macam kegiatan dalam suatu sistim politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan—tujuan dari sistim itu dan melaksanakan

tujuan - tujuan itu". Ruang lingkup yang dibahas ilmu politik adalah konsep-konsep pokok tentang negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy*) dan pembagian (*distribution*) atau alokasi dari sumber - sumber dan *resources* yang ada (Budiarjo, 2001: 9). Politik selalu menyangkut tujuan- tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Sedangkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Partisipasi perempuan dalam politik diharapkan partisipasi yang mandiri atau otonom yang berdasarkan suatu kesadaran politik yang bukan terbatas pada pemilihan umum semata.

3. Pemberdayaan Perempuan Dalam Perspektif Gender

Konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan mengandung makna: tidak ada pihak yang menguasai dan yang dikuasai, tidak ada yang mengeksploitasi dan dieksploitasi tetapi mengandung arti kaum perempuan dan laki-laki saling memberdayakan sehingga mengakibatkan adanya dialog dan komunikasi. Sebaliknya, jika salah satu pihak mempunyai keinginan untuk menguasai pihak lain hubungan komunikasi ini dapat terganggu. Dengan kata lain, perempuan menjadi partner laki-laki atau istri menjadi pasangan sejajar bagi suami dalam ikut meningkatkan pendapatan keluarga, tanpa mengurangi tugas/kewajiban maupun hak dari masing-masing. Pemberdayaan dimaksud meliputi pemberdayaan ekonomi, psikologis, sosial, budaya dan politik. Untuk itu, konsep gender harus dipahami terlebih dahulu.

Gender adalah perbedaan sifat perempuan dan laki-laki yang tidak mengacu pada perbedaan biologis, tetapi pada nilai-nilai sosial budaya yang menentukan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan pribadi dan dalam setiap bidang kehidupan masyarakat. Gender adalah istilah yang mengacu kepada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara sosial. Konsep ini terkait dengan cara berpikir dan bertingkah laku sebagai perempuan dan laki-laki menurut persepsi dan harapan orang atas dasar tatanan masyarakat yang berlaku, bukan atas dasar perbedaan biologis.

TUTUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplikasi dan menganalisis peran politik perempuan Manggarai serta menemukan unsur- unsur penghambat perempuan Manggarai untuk berpartisipasi dalam partai politik.

SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu membawa perubahan yaitu adanya cara pandang yang baru terhadap perempuan, khususnya masyarakat Manggarai dapat menerima dan mendukung keterlibatan aktif perempuan dalam politik baik di partai politik maupun di legislatif. Untuk itu perlu dilakukan enkulturasi nilai-nilai kesetaraan mulai dari keluarga (orang tua), masyarakat, sekolah (pendidik), Gereja, LSM, pemerintah, dan partai politik.

METODE PENELITIAN

I. Pendekatan Penelitian

Perspektif penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan desain etnometodologi. Penelitian ini difokuskan kepada pola interaksi sosial masyarakat Manggarai dan partisipasi politik dan respon perempuan serta lembaga-lembaga yang terkait (*stake holders*) terhadap peran politik perempuan Manggarai, serta analisis latar partisipasi dan respon mereka dengan kondisi sosiologis masyarakat Manggarai. Ciri utama etnometodologi adalah ciri reflektif-nya, bahwa cara orang bertindak dan mengatur struktur sosialnya adalah sama dengan prosedur memberikan nilai terhadap struktur tersebut.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi partisipan terhadap aktivis perempuan, Pengurus parpol, Kasubag Pemberdayaan Perempuan, anggota LSM perempuan dan organisasi perempuan, anggota legislatif, eksekutif dan tokoh masyarakat. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah Teknik Analisa Taksonomi (*Taxonomic Analysis*) yang terfokus pada domain - domain tertentu untuk selanjutnya diuraikan dan dirinci ke dalam sub domain -sub domain yang lebih spesifik. Dalam penelitian mengenai konstruksi peran politik perempuan Manggarai, kurang lebih ada lima domain yang akan dirinci ke dalam sub domain .L subdomain yang lebih spesifik, yaitu 1) Penyebab , 2) Konsep Intervensi Pemerintah/Struktural, 3) Partai Politik, 4) Pendidikan Perempuan dan pengalaman Berorganisasi, 5) Budaya / Adat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Verheijen (1991:23), menyimpulkan bahwa orang Manggarai berasal dari beberapa macam suku seperti Boneng Kabo (Minangkabau), Goa, Bugis, Makasar, Bima, Sumba, Sabu dan dari Suku Melayu. Ciri orang Manggarai pada umumnya sabar, berani, ingin maju, menonjolkan kebersamaan /persaudaraan, suka musyawarah, gemar memakai perumpamaan atau penghalusan kata/nama, ramah (rawes). Kaum perempuan Manggarai pada umumnya rajin bekerja di kebun, terampil dalam pelbagai pekerjaan tangan seperti

menenun, menganyam tikar, membuat periuk, lembut, tenang dan tidak menginginkan pertengkaran serta keributan.

Kondisi geografis wilayahnya sebagian besar terdiri dari pegunungan dengan penduduk berjumlah 499.087 orang, terdiri dari 246.910 (49,47%) laki-laki dan 252.177 (50,53%) perempuan. Sedangkan kehidupan politik cukup berkembang dengan hadirnya partai-partai politik. ada pemilu 1999, ada 48 parpol di Kabupaten Manggarai dan 6 partai mendapat suara yang cukup banyak yakni PDIP, Golkar, PDKB, PPP, PKP dan PAN. Suara terbanyak diraih oleh PDIP. Sedangkan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004, jumlah partai politik peserta pemilu berkurang menjadi 24 partai politik, dan pilihan politik masyarakat Manggarai masih didominasi oleh Partai Golkar, menyusul PDIP dan PKPI untuk semua tingkatan.

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik sangat terkait dengan pendidikan. Di Manggarai, kenyataan diskriminasi terhadap perempuan dalam kesempatan pendidikan masih cukup menonjol. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit perempuan yang meraihnya.

label 1 Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2007

No	Pendidikan Tertinggi yang Dilamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase	
					L	P
1	Tidak tamat SD	111.891	118.177	230.068	48,63	51,37
2	SD	103.116	109.836	212.952	48,52	51,58
3	SLTP	17.887	15.730	33.617	53,2	46,8
4	SLTA	16.401	10.983	27.384	59,9	40,1
5	Diploma I / II	995	416	1.411	71,02	28,98
6	Akademi / D III	1.251	497	1.748	71,57	28,43
7	Sarjana / D IV	2.065	440	2.505	82,44	17,56
8	Tidak Terjawab	123	123	246	50	50
	Junilalt	253.729	256.192	509.921	49,76	50,24

Sumber BPS Manggarai, 2007

2 Konstruksi Peran Politik Perempuan di Manggarai

Konstruksi peran politik perempuan Manggarai dibangun berdasarkan konstelasi sosial perempuan di Manggarai yang menunjukkan posisi, peran, kedudukan / status sosial perempuan dalam paradigma masyarakat di Manggarai. Dalam hal ini ada dua (2) pandangan yang berbeda yakni

a) Pandangan Masyarakat Tradisional Konvensional

Perempuan adalah *Ata Pe'ang / orang luar* dan status tersebut tidak mungkin diubah, keberadaan perempuan dalam keluarga orang tua bersifat sementara, tidak berhak atas warisan orang tua, pengembangan diri (misalnya melalui pendidikan) sekeadarnya saja (bisa baca tulis) atau tidak perlu, tidak berhak untuk memimpin, dan tidak boleh berpolitik.

b) Masyarakat transisional : lebih moderat

Pembedaan *ata one* dan *ata pe 'ang* (laki-laki dan perempuan) bersifat sementara ketika perempuan belum berkeluarga/menikah karena setelah menikah perempuan akan menjadi orang dalam di keluarga suaminya, Laki-laki dan perempuan sama saja; Cukup banyak orang tua yang menyekolahkan anak perempuan sampai pendidikan tinggi; perempuan berhak mendapat warisan orang tua; perempuan bisa memimpin, Perempuan tidak tabu untuk terjun ke politik.

Khusus mengenai kuota 30 % perempuan di legislatif masih memunculkan perdebatan: partai politik (PDIP, Golkar) beranggapan bahwa pemberian kuota 30% *bukan* suatu kemutlakan (hanya perlu disiasati agar perempuan terwakili), partai politik membuka peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan dengan mengembangkan iklim kompetisi sehat. Sedangkan kelompok perempuan cenderung pesimis terhadap partai politik. Karena di partai politik terdapat kader-kader perempuan berkualitas tetapi tidak diakses untuk menjadi anggota legislatif Mereka menuntut agar partai politik minimal harus memenuhi kuota 30% perempuan, proaktif dalam menjaring kader-kader perempuan yang bermutu (perlu pola rekrutmen kader yang jelas), dan butuh komitmen semua pihak (pemerintah, partai politik, aktivis perempuan, tokoh agama dan tokoh masyarakat) untuk mendukung partisipasi politik perempuan. Perempuan Manggarai juga menuntut agar kriteria rekrutmen kader perempuan adalah kredibilitas dan kualitas, bukan keterwakilan jenis kelamin.

Di pihak lain (Masyarakat umum termasuk Gereja) lebih menekankan pada faktor kesiapan perempuan itu sendiri dan komitmen partai politik terhadap tuntutan UU nomor 12 tahun 2003 khususnya pasal 65 (1) atau UU No 10 Tahun 2008, pasal 53. Untuk itu perlu didukung oleh adanya perjuangan solidaritas kaum perempuan dan keseriusan Komisi Pemilihan Umum dalam menerapkan aturan tersebut. Sebab terbukti bahwa jumlah perempuan di legislatif Manggarai masih di bawah 30%.

Tabel 2 Data Anggota Legislatif .nam Periode Terakhir

Periode	Anggota Legislatif		Prosentase	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1987 — 1992	6	39	13.3	86.7
1992 — 1997	4	11	8.9	91.1
1997 — 1999	4	41	8.9	91.1
1999 — 2004	-	45	0	100
2004-2009	3	42	6.7	93.3
2009 — 2014	4	36	10	90

Sumber : Sekretariat DPRD 11 Manggarai

Sebenarnya kuota 30 % perempuan menurut UU Pemilu No.10 Tahun 2008 dengan sistem penempatan caleg perempuan secara *zipper* dapat mengakomodir partisipasi minimal perempuan baik dalam partai politik maupun di legislatif. UU ini memberi jaminan hukum bahwa partai politik *harus* mencalonkan 30 % perempuan sebagai calon anggota legislatif (bdk. pasal 15 (d), Pasal 56 ,Pasal 58 ayat 2, Pasal 61 ayat 2). Namun, Mahkamah Konstitusi kemudian meloloskan *Judicial review* mengenai penentuan pemenang dengan 'sistem suara terbanyak'. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten sehingga banyak caleg perempuan yang mengundurkan diri.

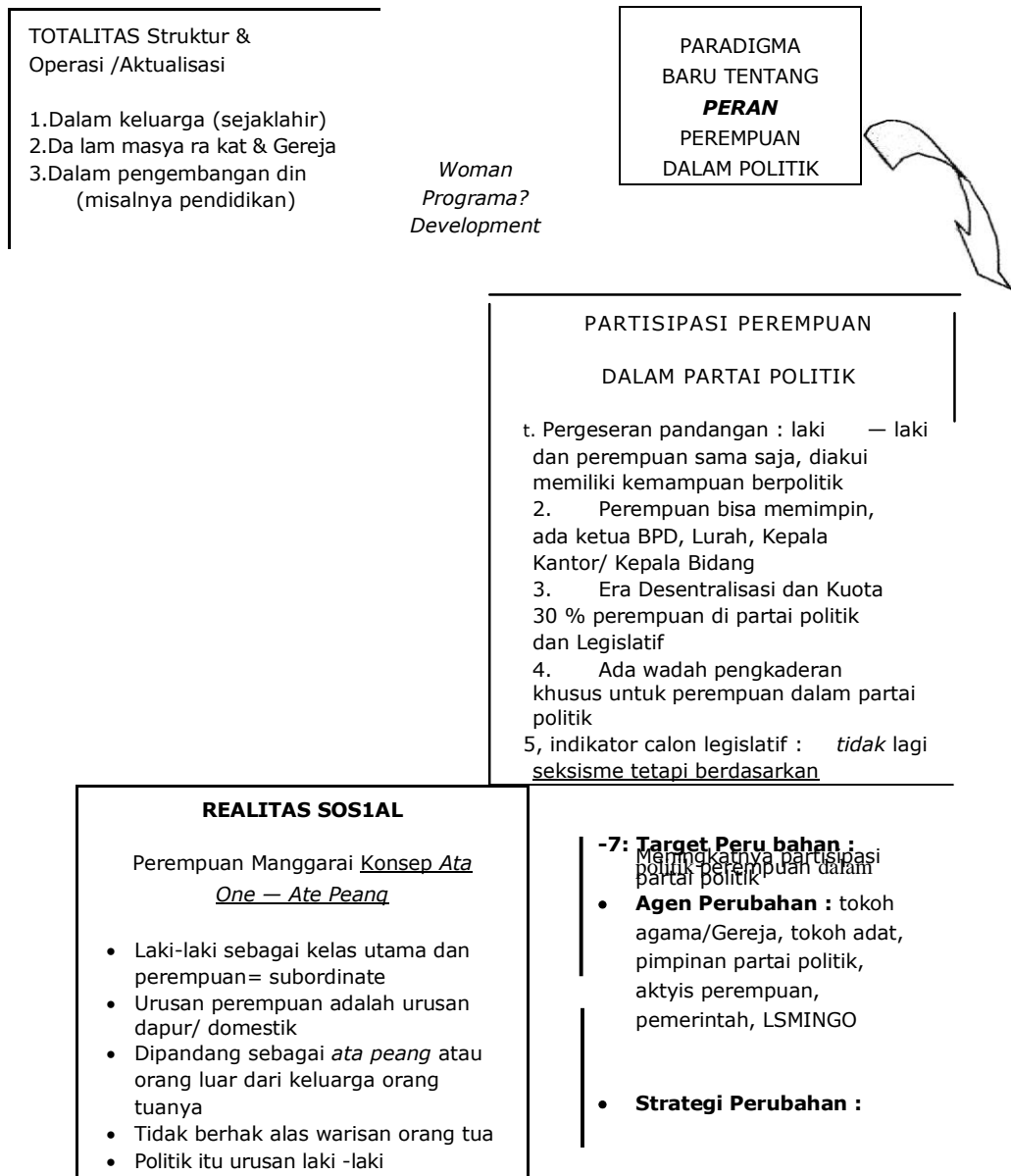
Kita bisa belajar dari negara — negara lain yang lebih dahulu menerapkan kuota 30 %. Menurut Women's Environment and Development Organization, sebuah organisasi internasional yang memonitor keterwakilan perempuan di parlemen di seluruh dunia, ada sekitar 13 negara yang menggunakan sistem elektoral representasi proporsional (sistem daftar) dengan sistem kuota zipper. Dan ternyata, dalam waktu yang relative singkat, Negara-negara tersebut berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan melampaui angka *critical mass* (30%). Menariknya, negara-negara tersebut tidak hanya mewakili negara-negara maju yang sudah mapan sistem politiknya (seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark), tapi juga negara-negara berkembang yang masih bermasalah dengan kehidupan politik dan ekonominya (seperti Rwanda, Argentina, Mozambik, dan Afrika Selatan).

Perhatian terhadap kapasitas dan kapabilitas perempuan (kualitas diri perempuan) untuk menjadi anggota legislatif didasarkan tujuh (7) hal yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang dalam lembaga legislatif (Czudnowski dalam Fadillah Putra, 2003 :207-208) yaitu: *a) Sosial Background* :Pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, lingkungan dimana dia dibesarkan; *b) Political Socialization* :*Sosialisasi politik* membuat seseorang terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik; *c) Political Activity* : Aktivitas dan pengalaman politik *Apprenticeship* /Mempersiapkan diri menerima tugas melalui "magang" *Occupational Variables* : Calon elit di lihat dari pengalaman kerjanya di lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik, *°Motivations* ; *g) Selection* mekanisme rekrutmen yang berlaku terbuka atau tertutup.

3. Model Konstruksi Struktur Partisipasi Politik Perempuan Manggarai Dalam Partai Politik

Untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan dibutuhkan investasi potensi perempuan demi pengembangan dan pemberdayaan potensi perempuan yang dilakukan secara sinergis dalam networking positif antara tokoh-tokoh agama/ Gereja, tokoh adat, LSM / NGO, partai politik, pemerintah dan tokoh-tokoh perempuan. Sinergitas positif memungkinkan perempuan meraih partisipasi politik yang lebih besar. Pemberdayaan dimaksud adalah pemberdayaan pendidikan, sosial budaya dan politik, termasuk pendidikan politik.

Bagan 2 Model Perubahan Konstruksi Sosial Perempuan Manggarai
di Flores Nusa Tenggara Timur



Kebiasaan, Pola hidup,
Nitai-nilai, Perilaku

KONSEP:

Enkulturasi nilai
kesetaraan gender

Terwujudnya keadilan
dan kesetaraan gender

Tabel 3 Upaya Peningkatan Aksesibilitas Perempuan Manggarai ke Legislatif Melalui Partai Politik

1. NU	Strategi	Langkah-tahap
<p>Terbata & Rya aksesibilitas partisipasi politik perempuan II Manggarai ke partai politik</p>	<p>1. Menyatukan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan kebijakan/ pengambil keputusan setiap lembaga pemerintahan dan institusi masyarakat (tokoh agama, tokoh politik, tokoh adat)</p> <p>2. Meningkatkan keterpaduan melalui pengembangan kemitraan dan jejaring</p>	<p>a. Sosialisasi dan dialog kelompok/bersama</p> <p>b. Membangun kesepahaman bersama untuk kerja sama</p> <p>c. Sektor pengidentifikasian kader perempuan. negosiasi (Advokasi)</p> <p>d. Keterbukaan dan kerelaburan untuk bekerja sama (melepas ego sektoral)</p> <p>e. Merumuskan pola-pola kegiatan terpadu pemberdayaan perempuan</p> <p>f. Membentuk lembaga jaringan kerja sama/kemitraan/mitsalnya jaringan</p>
	<p>3. Perluasan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan</p>	<p>a. Sosialisasi nilai-nilai kesetaraan in ulai dari keluarga, kemudian masyarakat</p> <p>b. Pendataan pendidikan perempuan</p> <p>c. Memperbanyak bentuk pendidikan formal dan non formal</p> <p>d. Beasiswa pendidikan kepada perempuan berprestasi</p>
	<p>4. Meningkatkan jumlah perwakilan perempuan di partai politik dan legislatif</p>	<p>a. Inventarisasi perempuan berpotensi baik dari segi pendidikan maupun pengalaman organisasi</p> <p>b. Pendidikan dan pekatihan kepemimpinan dan seni berorganisasi</p> <p>c. Revitalisasi peran dan fungsi organisasi-organisasi perempuan</p> <p>d. Advokasi dan animasi terluadap perempuan dan parpol</p> <p>e. Pendidikan Politik</p>

Sumber : Data diolah

SIMPULAN : Perubahan Peran Politik Perempuan dalam Refleksi Teori-teori Sosial

Perubahan peran politik perempuan di Manggarai Flores disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal perempuan dan faktor eksternal adalah Gereja, Partai Politik, Tokoh Adat, Pemerintah, LSM. Dan transformasi sosial yakni meningkatnya dan diterimanya partisipasi perempuan dalam politik harus terencana secara konsekutif dan bertahap. Hal ini sejalan atau mendukung pendapat Spot bahwa ditilik dari penyebabnya, perubahan sosial (dalam Faisal dan Yazik, tt :89) meliputi perubahan yang datang dari luar (*exogenous change*) dan perubahan dari dalam (*endogenous change*). Sedangkan menurut tingkat kemungkinan diramalkannya terdapat perubahan episodik (*episodic change*) dan perubahan terpola (*pattern change*).

Pemberdayaan Perempuan dalam politik tergantung dominasi kekuasaan, artinya kekuasaan Elite menjadi tumpuan untuk merefleksikan keterlibatan perempuan dalam politik, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh religi, tokoh Pemerintahan, tokoh Politik merupakan jaringan komunikasi dalam pemberdayaan dan keterlibatan perempuan dalam politik. itu berarti mendukung apa yang dikatakan Ginsberg (dalam Faisal dan Yazik, tt 89-90) bahwa perubahan sosial dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti adanya orang "kuat" yang menjadi pengilham dan atau motor perubahan, adanya keinginan dan putusan-putusan mengenai suatu masalah yang diberlakukan bagi masyarakat, adanya modifikasi-modifikasi struktural yang dilakukan,...Orang "kuat" sebagai penentu perubahan tata makna keadilan gender dalam masyarakat Manggarai adalah 1) Perempuan Manggarai (internal), sedangkan faktor eksternal bisa diurut berdasarkan dominasi pengaruhnya yaitu : 1) Gereja, 2) Tokoh Adat/Masyarakat, 3) Pemerintah, 4) Partai Politik, 5) LSM. Komitmen dan sinergitas kelompok elit ini sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam partai politik dan di legislatif. Temuan ini menguatkan pendapat Ginsberg yang menyebutkan bahwa sebab-sebab perubahan sosial tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling berpautan dan semua perubahan sosial ini ke arah "tujuan" (teleologis), yaitu untuk kelestarian hidup masyarakat itu sendiri, terciptanya relasi kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan yang equal dan egaliter.

Dalam perspektif Teori Fungsionalisme Struktural. Konstruksi sosial masyarakat Manggarai yang patriarkhis merupakan suatu bentuk sistem yang dapat dipahami dalam interaksi antara bagian —bagiannya, yaitu interaksi antara masyarakat dan perempuan dalam suatu integritas sosial masyarakat Manggarai. Kenyataan ini memperkuat perspektif fungsional struktural (Durkheim, Parsons) bahwa masyarakat pada dasarnya adalah keseluruhan organis yang memiliki realitas tersendiri dan memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian —bagian yang menjadi anggotanya agar tetap normal dan menjadi langgeng. Konsekuensinya adalah bila kebutuhan tidak

terpenuhi maka dapat terjadi ketidakseimbangan sosial yang dilihat sebagai *patologis*. Karena itu, fungsionalisme selalu mengedepankan masalah ketertiban sosial.

Penelitian ini juga menemukan bahwa terjadi *dediferensiasi* (melumernya) pola pikir dikotomis masyarakat Manggarai yang membedakan peran laki-laki dan perempuan dan terbukanya peluang bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini merupakan hasil refleksi terhadap cara masyarakat Manggarai bertindak dan mengatur struktur sosialnya dan memberikan nilai terhadap struktur tersebut, sebagaimana yang dikatakan Garnfinkel dalam pendekatan etnometodologis. Menurutnya, manusia adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk menekonstruksi dunia sosial berdasarkan kekuatannya untuk melakukan interpretasi. Dalam hal ini, aktor sosial menginterpretasikan situasi — situasi dari tindakannya, jangkauan tujuan, dan motivasi — motivasi lainnya untuk memperoleh pemahaman intersubjektif dan mengkoordinasikan tindakan — tindakannya serta secara umum mengarahkan dunia sosialnya (Heritage, 1987, dalam Basrowi dan Sukidin, 2002 :51). Aktor penentu perubahan peran politik perempuan Manggarai adalah perempuan (individu/keompok), tokoh Gereja, tokoh adat, Pemerintah, partai politik dan LSM.

Kemudian berdasarkan analisis mengenai pola interaksi sosial masyarakat Manggarai (Teori Interaksionisme Simbolik), partisipasi politik dan respon perempuan serta lembaga-lembaga yang terkait (*stake holders*) terhadap peran politik perempuan Manggarai, serta analisis latar partisipasi dan respon mereka dengan kondisi sosiologis masyarakat Manggarai, ditemukan bahwa secara filosofis, tata pikir *ata pe'ang* (perempuan) dan *ata one* (laki-laki) yang menempatkan laki-laki sebagai kelas utama dan perempuan sebagai kelas kedua tetap diterima, namun tata maknanya berubah yakni tidak lagi dilihat secara dikotomis yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan tetapi dipahami sebagai relasi yang komplementer dan resiprokal, termasuk relasi dalam partai politik dan legislatif. Hal ini mendukung asumsi interaksi simbolik dari Blumer (1969:2), Poloma (1984) bahwa : (1) manusia bertindak terhadap sesuatu obyek atas dasar makna- makna yang ditiliki oleh benda-benda itu bagi mereka; (2) makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat, (3) makna — makna tersebut berkembang dan dimodifikasi pada saat interaksi berlangsung, yaitu melalui proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapi. Dengan demikian, apa yang disebut struktur sosial oleh kaum struktural fungsional sesungguhnya adalah hasil dari interaksi masyarakat.

REKOMENDASI

Selain komitmen dan sinergitas berbagai komponen masyarakat Manggarai untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, maka program atau kegiatan konkret yang harus dilakukan adalah Pendidikan Politik bagi perempuan. Selain itu, beberapa aspek perubahan sosial dalam masyarakat Manggarai yang bisa dikaji lebih lanjut antara lain a)

Posisi partisipasi politik perempuan di dalam partai politik dan legislatif, b) Relasi kekerabatan sosial perempuan Manggarai dan patrilokal dalam perubahan konstelasi sosial perempuan Manggarai, c) Apakah partisipasi politik perempuan secara individu atau kelompok membutuhkan suatu institusi, misalnya partai politik atau organisasi perempuan secara khusus?" Karena kenyataannya, kuota 30% yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu belum dicapai secara maksimal yang disebabkan oleh empat hal yaitu adat, agama, pendidikan dan kepastian sistem hukum politik dan pemilu., d) Hak dan kewajiban perempuan dalam relasi persaudaraan berkaitan dengan pergeseran makna warisan seperti *wida* dan *sida*.

Daftar Pustaka

- Basrowi dan Sukidin, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Blumer, Herbert, 1969, *Symbolic Interactionism, Perspectives and Method*, California University Press, Berkeley.
- Budiardjo, Miriam, 1981, *Partisipasi dan Portal Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Persell, Caroline Hodges, 1990, *Understanding Society*, Harper & Row, Publisher, New York
- Dharma, S. (Ed), 2002, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI, 1991, *Bahan Pokok Petyziliihan Hukum Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (UUNo. 7 tahun 1984), Kesejahteraan Anak (U11 No. 4 tahun 1979)*. Jakarta.
- Dunn, William.N, 2002, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press Yogyakarta.
- Erb, Maribeth, 1999, *Tfinzishing Cultures of 77ze World, The Manggaraians A Guide to Traditional Lifestyles, Times Editions*.
- Jurnal Perempuan No. 19 Tahun 2001.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2003, *Pengarusulamaan Gender* Jakarta. Lauer, Robert H, 2001, *Perspektif Muting Perubahan Sosial*, PT Rineka Cipta, Jakarta. Morrissey, R. George, 1997, *Morrissey dan Perencanaan Prenhallindo*, Jakarta.
- Prijono, Oni S, dan Pranaka, AMW., 1996, *Pemberticwaarr 'Curtsy') Kebijakan dan Implenzentasi*, CS1S Jakarta.

-
- Putra Fadillah, 2003, *Portal Politik dan Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Beberapa teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*, CV Rajawali Pers. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang *Portal Politik* dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Portal Politik*.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Pemilu* dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Pemilu*.
- Verheijen, Jillis, A., 1967, *Kamus Alufgarai-Indonesia*, Koninklijk Instituut voor Thal-
Land En fblkenkunde.